



KEMENTERIAN
DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



PEMERINTAH
KABUPATEN JEMBRANA

PROFIL

**BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBRANA**

2025



Profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Jemberana 2025

Daftar Isi



Kata Pengantar



Om Swastyastu

Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatu
Salom, Namo Budayo, Salam Kebajikan, Rahayu
SALAM PANCASILA

Puja Pangastuti Angayu Bagia, kami haturkan kehadiran Ida Sanghyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas WaranugrahaNya, dengan sebuah kebanggaan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana, sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana dapat menyusun Buku Profil yang sederhana ini.

Buku Profil ini berisikan informasi dan data yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diantaranya Gambaran Umum tentang Kabupaten Jembrana maupun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu sendiri, yang meliputi Struktur Organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya, program dan kegiatan, kompilasi data, mitra kerja dan galeri kegiatan. Kami berharap dengan adanya Buku Profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 ini, akan melengkapi galeri buku-buku profil organisasi perangkat daerah yang lain di Kabupaten Jembrana.

Selain itu, dengan adanya Buku Profil ini, akan mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak saja bagi sesama Aparatur Pemerintah, tetapi yang lebih penting bagi masyarakat luas yang dapat dengan mudah diakses, termasuk bagi akademisi dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Tentu buku ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami membuka ruang masukan dan kritikan yang produktif untuk kesempurnaan buku ini. Terimakasih dan penghargaan kami berikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku profil ini. Semoga Buku ini bermanfaat dalam mewujudkan Jembrana yang Maju, Harmoni dan Bermartabat. Terimakasih

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Jembrana,

I Md Leo Agus Jaya, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196708041989021004



Gambaran Umum

A. Letak Geografis Kabupaten Jembrana

Kabupaten Jembrana Bali, membentang dari LS dan 114°25'53" - Secara geografis, batas wilayahnya meliputi Samudra Hindia di sebelah selatan, Selat Bali di sebelah barat, Kabupaten Bulaleng di sebelah utara dan serta Kabupaten Tabanan di sebelah timur. Wilayahnya meliputi pegunungan di utara dan dataran (pantai) di selatan.



A.1. Luas dan Batas Wilayah

Luas Kabupaten Jembrana kurang lebih sekitar 841,80 Km atau sekitar 84.180 Ha, dengan batas wilayah, Utara : Pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Buleleng, Barat : Selat Bali, Selatan : Samudera Hindia dan Timur : Kabupaten Tabanan.

A.2. Jumlah Kecamatan

Kabupaten Jembrana memiliki 5 Kecamatan yang terdiri dari :

1. Kecamatan Melaya.
2. Kecamatan Negara.
3. Kecamatan Jembrana.
4. Kecamatan Mendoyo.
5. Kecamatan Pekutatan.

A.3. Jumlah Desa dan Kelurahan

Kabupaten Jembrana memiliki total 51 desa, kelurahan. Secara lebih rinci, berdasarkan data tahun 2025, terdapat 10 kelurahan dan 41 desa yang tersebar di lima kecamatan di Jembrana.

A.4. Jumlah Desa Adat

Sebagai bagian dari Provinsi Bali yang kental dengan adat dan budayanya, Kabupaten Jembrana juga memiliki Desa Adat Berdasarkan Data 2021 - 2025 jumlah Desa Adat di Kabupaten Jembrana sebanyak 64 Desa Adat yang tersebar di lima kecamatan.

A.5. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Jembrana Tahun 2024 adalah 329.353 jiwa. Berikut jumlah penduduk Kabupaten Jembrana di setiap kecamatan pada tahun 2024.





Melaya
64.330 jiwa



Negara
100.451 jiwa



Jembrana
64.169 jiwa



Mendoyo
70.148 jiwa



Pekutatan
31.043 jiwa



B. Bupati Jembrana

dari Tahun 1929 sampai Sekarang



No	Nama	Periode	Jabatan
1	Anak Agung Bagus Negara	1929-1958	Raja Jembrana
2	Ida Bagus Gede Dosther, SH	1949-1967	Bupati Kdh
3	Kapten R. Syafroni	1957-1969	Bupati Kdh
4	Drs. Putu Suasnawa	Maret-Juni 1969	Pjs. Bupati Kdh
5	I Ketut Sirya	30 Juli 1969-30 Juli 1974-	Bupati Kdh.
6	Drs. I Nyoman Tastra	31 Juli 1974-28 Juli 1975	Pjs. Bupati Kdh
7	Letkol. Liek Rochadi	28 Juli 1975-26 Agustus 1980	Bupati Kdh
8	Drs. Ida Bagus Ardana	26 Agst 1980-27 Agust 1990	Bupati Kdh
9	Ida Bagus Indugosa, SH	27 Agust 1990-27 Agust 2000	Bupati Kdh
10	I Ketut Wijana, SH	28 Agust-15 Nopember 2000	Plh. Bupati
11	Prof.Dr.drg. I Gede Winasa	15 Nop 2000-10 Okt 2010	Bupati
12	I Gst Md. Sunendra, SH	16 Nop 2010-16 Feb 2011	Pj. Bupati
13	I Putu Artha, SE., MM.	16 Feb 2011-16 Feb 2021	Bupati
14	Drs. I Nengah Ledang	16 Feb - 26 Feb 2021	Plh. Bupati
15	I Nengah Tamba, SH	26 Feb 2021-20 Feb 2024	Bupati
16	Dr. I Ketut Sukra Negara, S.Sos., M.Si	24 Sept 2024-24 Nop 2024	Pj. Bupati
17	I Made Kembang Hartawan, SE., MM.	20 Pebruari 2025 - sekarang	Bupati



c. Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Jembrana



Visi :

Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru Di Kabupaten Jembrana Menuju Jembrana Yang Maju, Harmoni Dan Bermartabat Dengan Membangun Manusia, Alam Dan Budaya.

Misi :

1. Menjaga manusia untuk mewujudkan masyarakat Jembrana yang berdaya saing dan mandiri,
2. Menjaga Alam dan lingkungan untuk menghadirkan ekosistem hijau dan ramah serta dapat mengakomodir kehidupan Jembrana.
3. Menjaga Agama, budaya, adat dan tradisi Jembrana.
4. Mewujudkan pelayanan publik yang responsif, adaptif dan inovatif.



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Jembrana

A. Sejarah Badan Kesbangpol Kabupaten Jembrana

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana, sebelum statusnya ditingkatkan menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sejak tahun 2008 statusnya masih berupa Kantor. Bahkan sebelumnya untuk beberapa lama sebelum reformasi sempat bernama Kantor Sosial Politikj (Sospol), sejak pasca reformasi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik bergabung dengan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Badan Daerah, statusnya kemudian berubah menjadi Badan dengan tipe B (tiga Bidang) yaitu Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.

Mengingat statusnya sudah meningkat menjadi “Badan” pelaksanaan tugas dan fungsi diharapkan lebih baik karena akan lebih mudah melakukan koordinasi dengan Instansi lain baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana maupun dengan Instansi vertikal lainnya.



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jemberana pertama kali dijabat oleh I Ketut Eko Susila Adi Pramana, SE., M.Si. Kemudian digantikan oleh I Gusti Agung Kade Oka Diputra, S.E. pada tanggal 4 Oktober 2023. Dan sejak tanggal 28 Oktober 2025 sampai sekarang Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Jemberana dijabat oleh I Made Leo Agus Jaya, S.Sos., M.Si.

Kepala Badan Kesbangpol Kab. Jemberana

3 Juli 2020 s/d
4 Oktober 2023

4 Oktober 2023 s/d
28 Oktober 2025

28 Oktober 2025 s/d
Sekarang



I Ketut Eko Susila
Artha Permana, SE., M.Si



I Gusti Agung Kade
Oka Diputra, SE



I Made Leo
Agus Jaya, S.Sos., M.Si



Gedung yang ditempati oleh Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik berada di lingkungan Pusat Pemerintahan Daerah Kabupaten Jemberana yang terletak di Jalan Surapati No. 1, Telp (0365) 41210 Ext (3398). Gedung Lantai II.

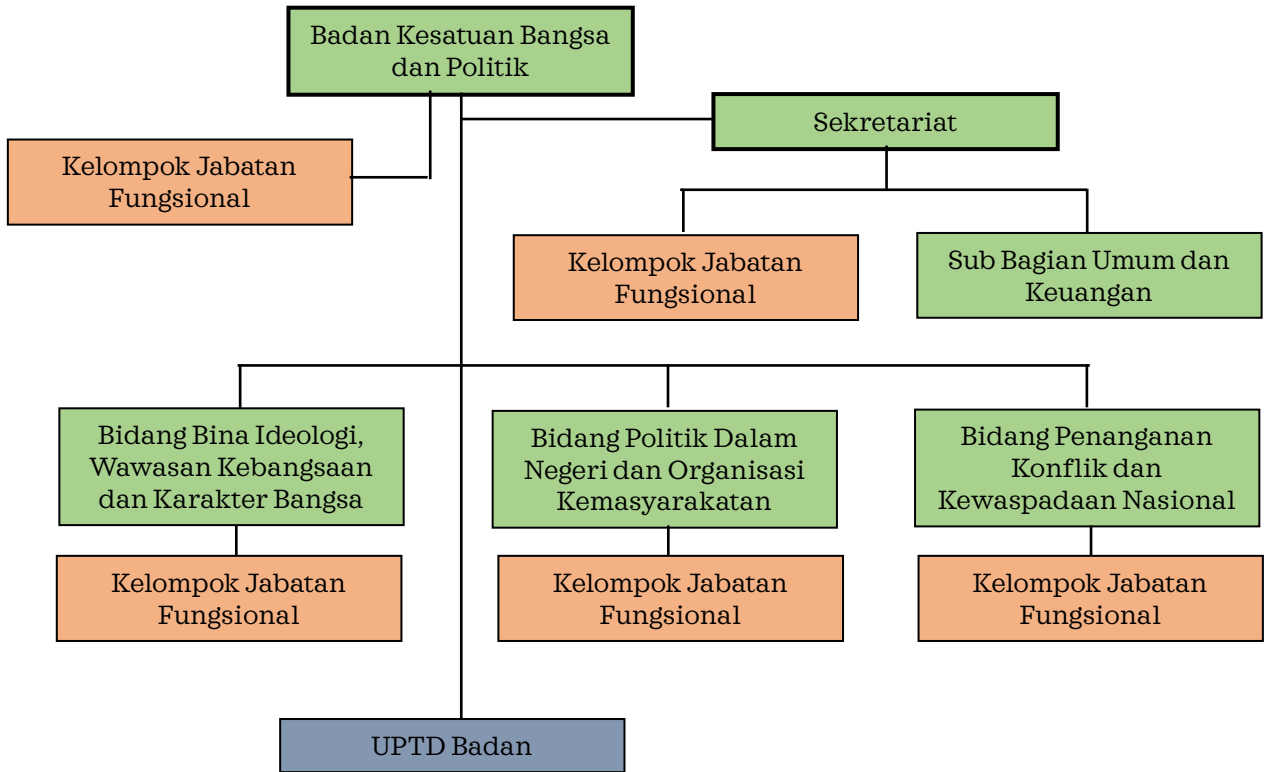
B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Jemberana Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Badan Daerah, organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jemberana terdiri dari ;

1. Kepala Badan
2. Sekretaris Badan
3. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.
4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
5. Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
6. Jabatan Fungsional



Adapun Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jemberana adalah sebagai berikut :



C. Tugas dan Fungsi

C.1. Tugas

Badan Kesbangpol mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

C.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



C.3. Rincian Tugas

C.3.1. Kepala Badan



Kepala Badan mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:

- a. Merumuskan rencana strategis (renstra) Badan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- b. Menyusun perencanaan pencapaian sasaran Badan agar terlaksana dengan efektif dan efisien.
- c. Mengoordinasikan perencanaan, penelitian/ pengembangan, pengendalian/evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan perangkat daerah yang terkait agar terjalin harmonisasi pelaksanaan tugas.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh bawahan melalui sistem pengendalian intern agar program dan kegiatan berjalan dan berhasil sesuai dengan indikator sasaran strategis yang diperjanjikan.
- e. Menindaklanjuti dan mempedomani amanat peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang tugasnya agar tidak terjadi penyimpangan yang berdampak pada kegagalan pencapaian target yang diperjanjikan.
- f. Memonitor terhadap pemenuhan laporan dan data oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan perangkat daerah serta instansi lain yang berkepentingan agar kesesuaian maupun ketepatan laporan dan data dapat dipertanggungjawabkan.
- g. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- h. Pelaksanaan dan pembinaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- i. Memberikan petunjuk penyelesaian permasalahan kepada bawahan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan agar program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- j. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kinerja dan kedisiplinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas guna pencapaian sasaran organisasi.
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.



C.3.2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan program kerja Badan.
- b. Memimpin seluruh kegiatan Sekretariat.
- c. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan system akuntansi dan pelaporan keuangan Badan.
- d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai di lingkup Badan.
- e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan.
- f. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Badan.
- g. Menyelenggarakan koordinasi bahan penyusunan rancangan produk hukum daerah dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan di lingkup Badan.
- h. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan laporan Badan.
- i. Menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Bidang.
- j. Melaksanakan koordinasi dengan bidang secara berkala agar program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan.
- k. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan.
- l. Memberikan saran dan pertimbangan sebagai bahan pengambilan kebijakan Badan.
- m. Menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lingkup Badan.
- n. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Sekretariat.
- o. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah.
- p. Membimbing dan memberi petunjuk penyelesaian permasalahan kepada bawahan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan agar program dan kegiatan dapat

terlaksana sesuai dengan perencanaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

- q. Menilai prestasi kerja bawahan.
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

C.3.3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:

- a. Membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian.
- b. Menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal pelaksanaan kegiatan subbagian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun terlaksana secara efektif dan efisien.
- c. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar, administrasi barang dan perlengkapan Badan, serta pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan Badan.
- d. Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga, kearsipan, kehumasan, dan keprotokoleran Badan.
- e. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Badan.
- f. Mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian Badan.
- g. Melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan inventarisasi perlengkapan Badan.
- h. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan, dan kendaraan Badan.
- i. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian.
- j. Mempersiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian.
- k. Mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai Badan.
- l. Membuat laporan kepegawaian dan bahan pelaksanaan penilaian kinerja setiap pegawai.
- m. Menyiapkan bahan dan menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran Badan seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Menyiapkan bahan dan menyusun dokumen laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Badan seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan



- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Memverifikasi dokumen administrasi keuangan.
 - p. Melaksanakan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - q. Melaksanakan pembukuan terhadap transaksi keuangan;
 - r. Melaksanakan penatausahaan keuangan Badan.
 - s. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan transaksi keuangan.
 - t. Memeriksa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - u. Memeriksa pembayaran gaji Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) pegawai yang mutasi.
 - v. Melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi, dan menandatangani surat pertanggung jawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan.
 - w. Mengkompilasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari masing-masing bidang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - x. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi program, kegiatan, dan anggaran Badan.
 - y. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan.
 - z. Menyenggarakan sistem pengendalian intern.
 - aa. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier.
 - bb. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan serta mencari alternatif pemecahannya.
 - cc. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
 - dd. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

C.3.4. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa.

Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa berdasarkan rencana strategis Badan.
- b. Menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan jadwal pelaksanaan urusan Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-



undangan agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun terlaksana secara efektif dan efisien.

- c. Membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan.
- d. Melaksanakan pembinaan pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara.
- e. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan, dan kerukunan umat beragama.
- f. Melaksanakan pembinaan karakter bangsa, kesadaran bela negara, dan cinta tanah air.
- g. Melaksanakan pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa kejuangan.
- h. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi toleransi dan kerukunan dalam hidup beragama.
- i. Melakukan pengendalian internal dengan sistem pengendalian intern secara berkala agar permasalahan-permasalahan cepat dapat tertangani.
- j. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier.
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

C.3.5. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan rencana strategis Badan.
- b. Menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan jadwal pelaksanaan urusan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun terlaksana secara efektif dan efisien.
- c. Membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan.
- d. Melaksanakan pembinaan kehidupan demokrasi, hak asasi manusia, dan pendidikan politik.
- e. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Legislatif, serta pemilihan Kepala Daerah.
- f. Melaksanakan pembinaan kelembagaan partai politik.



- g. Melaksanakan pembinaan organisasi kemasyarakatan.
- h. Melaksanakan pelayanan, pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing.
- i. Melaksanakan pelayanan rekomendasi penelitian dan pengawasan penelitian.
- j. Melakukan pengendalian internal dengan sistem pengendalian intern secara berkala agar permasalahan-permasalahan cepat dapat tertangani.
- k. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier.
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

C.3.6. Kepala Bidang Penangan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Kepala Bidang Penangan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional berdasarkan rencana strategis Badan.
- b. Menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan jadwal pelaksanaan urusan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun terlaksana secara efektif dan efisien.
- c. Membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan.
- d. Melaksanakan pencegahan dan penanganan konflik, dan pemulihan pasca konflik.
- e. Melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan masyarakat perbatasan.
- f. Melaksanakan pemantauan daerah rawan konflik.
- g. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan kewaspadaan dini masyarakat dan kerjasama intelijen.
- h. Melaksanakan pelaksanaan dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat dan kerjasama intelijen;
- i. Memfasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- j. Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pembinaan pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba.
- k. Melaksanakan pengawasan orang asing di daerah.



- l. Melakukan pengendalian internal dengan sistem pengendalian intern secara berkala agar permasalahan-permasalahan cepat dapat tertangani.
- m. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier.
- n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

C.3.7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian atau keterampilannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.



Progam **dan** Kegiatan

A. Sekretariat Badan.

- Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/kota
- I. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
2. Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi.
- II. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd;
2. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn;
3. Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Skpd.
- III. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
2. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan;
3. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor;
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd.
- IV. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya;
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan.
- V. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.



VI. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

VII. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan

B. Bidang Bina Ideologi, Wawasan dan Karakter Bangsa.

Program : Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

1. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah;
 2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah;
 3. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah;
 4. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah.



C. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Program : Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Kegiatan : 1. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah;

2. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah;

3. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah;

4. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah;

5. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah.

Program : Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.



Sub Kegiatan : 1. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan;

2. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan;

3. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan;

4. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan;

5. Penyusunan Program Kerja Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan.

Progam : Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik

Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;

2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;



3. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;
4. Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;
5. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.

D. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.

Program : Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial

- Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah;
2. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/kota;
3. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah;
4. Penyusunan Program Kerja Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah;



5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah.



Kompilasi Data

Tabel Data A.1
Pendidikan Pegawai / Karyawan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Jembrana Tahun 2026

No	Pendidikan	L	P	Jumlah
1	Sarjana Strata 3	-	-	-
2	Sarjana Strata 2	6	-	6
3	Sarjana Strata 1	6	3	9
4	Diploma	-	1	1
5	Sekolah Menengah Atas/Kejuruan	4	6	10
6	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	-	-	-
7	Sekolah Dasar / Sederajat	-	-	-
Jumlah Total		16	10	26

Sumber Data : Sekretariat Badan Kesbangpol

Tabel Data A.2
Pangkat/Golongan Pegawai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Jembrana Tahun 2025

No	Pangkat / Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan IV / c	1	-	1
2	Golongan IV / b	1	-	1
3	Golongan IV / a	3	-	3
4	Golongan III / d	2	1	3
5	Golongan III / c	-	-	-
6	Golongan III / b	-	-	-
7	Golongan III / a	2	1	3
8	Golongan II / d	-	1	1
9	Golongan II / c	-	-	-
10	Golongan II / b	-	-	-
11	Golongan II / a	1	-	1
12	Golongan I / d	-	-	-
13	Golongan I / c	-	-	-
14	Golongan I / b	-	-	-
15	Golongan I / a	-	-	-
16	Golongan X	-	-	-
17	Golongan IX	2	2	4
18	Golongan VIII	-	-	-
19	Golongan VII	-	1	1
20	Golongan VI	-	-	-
21	Golongan V	2	3	5
Jumlah Total		14	9	23

Sumber Data : Sekretariat Badan Kesbangpol



Tabel Data A.3
 Status Kepegawaian
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Jembrana Tahun 2025

No	Status Kepegawaian	L	P	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	11	3	14
2	Pegawai dengan Perjanjian Kerja	5	7	12
3	Pegawai Alih Daya	2	-	2
Jumlah Total		18	10	28

Sumber Data : Sekretariat Badan Kesbangpol

Tabel Data A.4
 Jumlah Surat Keluar dan Masuk
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Jembrana Tahun 2024 dan 2025

No	2024		2025	
	Surat Masuk	Surat Keluar	Surat Masuk	Surat Keluar
1	620	483	448	463

Sumber Data : Sekretariat Badan Kesbangpol

Tabel Data A.5
 Pagu Anggaran
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Serapan	
			Realisasi (Rp)	Persentase
1	2023	19.089.515.911,00	18.760.602.699,00	98,28
2	2024	32.855.081.217,00	32.612.942.079,00	99,26
3	2025	6.691.549.493,00	6.090.405.422,00	91,02

Sumber Data : Sekretariat Badan Kesbangpol

Tabel Data B.1
 Jumlah Panitia Rekrutmen/Seleksi
 Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2025

No	Unsur	2025		
		L	P	Jumlah
1	Tentara Nasional Indonesia	3	-	3
2	Kepolisian Republik Indonesia	-	-	-
3	Badan Kesbangpol	-	-	-
4	Dokter	5	-	5
5	Tenaga Medis	-	-	-
6	Purna Paskibraka	4	-	4
7	Lainnya	3	-	3

Sumber Data : Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa



Tabel Data B.2
Jumlah Anggota Paskibraka

No	Tahun	L	P	Jumlah
1	2024	43	38	81
2	2025	43	40	83

Sumber Data : Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Tabel Data B.3
Jumlah Pelatih/Pembina/Pengasuh Paskibraka 2026

No	Unsur	L	P	Jumlah
1	Tentara Nasional Indonesia	3	-	3
2	Kepolisian Republik Indonesia	-	-	-
3	Badan Kesbangpol	-	-	-
4	Purna Paskibraka	-	2	2
5	Lainnya	3	-	3

Sumber Data : Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Tabel Data B.4
Purna Paskibraka dan Duta Pancasila

No	Tahun	Purna Paskibraka		Jumlah
		L	P	
1	2023	18	17	35
2	2024	43	38	81
3	2025	43	40	83
Jumlah Total		104	95	199

Sumber Data : Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Tabel Data B.5
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Diskusi
Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Tahun	Topik / Materi Diskusi	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
2023	-	-	-	-	-	-
2024	Materi wawasan kebangsaan	-	-	-	15	15 (SMP)
2025	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total		-	-	-	15	15(SMP)

Sumber Data : Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa



Tabel Data B.6
Jumlah Narasumber Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Tahun 2025

No	Unsur Narasumber	Pembinaan Ideologi Pancasila	Wawasan Kebangsaan
1	Tentara Nasional Indonesia	-	-
2	Kepolisian Republik Indonesia	-	-
3	Kejaksaan	-	-
4	Pengadilan	-	-
5	Kesbangpol	1	1
6 lainnya	-	-

Sumber Data : Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Tabel Data B.7
Jumlah Kegiatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Tahun	Bentuk / Nama Kegiatan	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
2023	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-
2025	Kesbangpol Goes to school	-	-	-	5	5 (SMP)
Jumlah Total		-	-	-	5	5 (SMP)

Sumber Data : Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Tabel Data B.8
Pelatihan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

No	Tahun	Jenis/Nama Pelatihan	Jumlah (orang)	Durasi (hari)	Tempat	Penyelenggara
1	2023	Paskibraka	35		GOR	Tes TWK
2	2024	Paskibraka	81		GOR	Tes TWK
3	2025	Paskibraka	83		GOR	Tes TWK
Jumlah Total			199		GOR	Tes TWK

Sumber Data : Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Tabel Data B.9
Pelaksanaan Koordinasi Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan

No	Tahun	Locus/Instansi/Pejabat	Durasi (jam/hari)	Dokumen Hasil Koordinasi	
				Ada	Tidak
1	2023	-	-	-	-
2	2024	15 SMP se Jemberana	90 menit	-	√
3	2025	-	-	-	-

Sumber Data : Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa



Tabel Data B.10
Monitoring dan Evaluasi Ideologi Pancasila dan
Wawasan Kebangsaan

No	Tahun	Locus/Instansi	Durasi (jam/hari)	Dokumen Hasil Monev	
				Ada	Tidak
1	2023	-	-	-	-
2	2024	15 SMP se Kab.Jembrana	90 menit	-	√
3	2025	-	-	-	-

Sumber Data : Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Tabel Data C.1
Jumlah Partai Politik di Kabupaten Jembrana
Tahun 2025

No	Nama Partai Politik	Alamat Sekretariat/Kantor
1	Partai Kebangkitan Bangsa	Jalan Gunung Semeru Gang 7, Kel. Loloan Timur, Kec. Jembrana
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Jalan Udayana, Kel. BB Agung, Kec. Negara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Jalan Ngurah Rai, Kel. Loloan Timur, Kec. Jembrana
4	Partai Golkar	Jalan Gatot Subroto, Kel. Lelateng, Kec. Negara
5	Partai NasDem	Jalan Sudirman, Kel. Pendem, Kec. Jembrana
6	Partai Buruh	Jl. Jalak Putih, Kel. Pendem, Kec. Jembrana
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kec. Negara
8	Partai Keadilan Sejahtera	Lingkungan Ketapang, Kel. Lelateng, Kec. Negara
9	Partai Kebangkitan Nusantara	Jl. Nakula, Kel. Banjar Tengah, Kec. Negara
10	Partai Hati Nurani Rakyat	Jalan Bima, Desa Baluk, Kec. Negara
11	Partai Garda Republik Indonesia	Jl. Patih Jelantik, Desa Batuagung, Kec. Jembrana
12	Partai Amanat Nasional	Jalan Durian Gg 1, Kel. Loloan Barat, Kec. Negara
13	Partai Bulan Bintang	Jl. Gunung Batur Gg X, Kel. Loloan Timur, Kec. Jembrana
14	Partai Demokrat	Jalan Gatot Subroto, Kel. Lelateng, Kec. Negara
15	Partai Solidaritas Indonesia	Jalan Denpasar Gilimanuk, Desa Baluk, Kec. Negara
16	Partai Perindo	Jalan Air Kuning, Desa Air Kuning, Kec. Jembrana
17	Partai Persatuan Pembangunan	Banjar Mandar, Desa Cupel, Kec. Negara
18	Partai Ummat	Jalan Raya Denpasar Gilimanuk, Banjar Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kec. Negara

Sumber Data : Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan



Tabel Data : C.2
Keterwakilan Partai Politik di DPRD Kabupaten Jembrana
Periode 2024-2029

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara	Jumlah Kursi DPRD
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	70.519	15
2	Partau Golongan Karya (Golkar)	32.398	6
3	Partai Demokrat	32.217	6
4	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	22.875	4
5	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	9.678	2
6	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	8.272	2

Sumber Data : Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Tabel Data C.3
Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Jembrana
Periode 2024-2029

No	Nama Partai Politik	Jumlah Anggota (orang)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	15
2	Partau Golongan Karya (Golkar)	6
3	Partai Demokrat	6
4	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	4
5	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2
6	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2
Jumlah Total		35

Sumber Data : Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Tabel Data C.4
Jumlah Anggota DPRD Provinsi Bali
Daerah Pemilihan Kabupaten Jembrana Periode 2024-2029

No	Nama Partai Politik	Jumlah Anggota (orang)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	2
2	Partau Golongan Karya (Golkar)	0
3	Partai Demokrat	1
4	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	1



5	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	0
6	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	0
Jumlah Total		4

Sumber Data : Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Tabel Data C.5
 Jumlah Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024
 di Kabupaten Jemberana

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih Tetap		Jumlah
		L	P	
1	Melaya	23.483	24.003	47.486
2	Negara	35.611	36.075	71.686
3	Jemberana	23.170	24.153	47.323
4	Mendoyo	26.354	26.988	53.342
5	Pekutatan	11.777	12.183	23.960
Jumlah		120.395	123.402	243.797

Sumber Data : Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Tabel Data C.6
 Jumlah Bantuan Anggaran Partai Politik
 Tahun 2024 s.d 2026

No	Nama Partai Politik	Jumlah Bantuan Tahun Anggaran 2024 Rp	Jumlah Bantuan Tahun Anggaran 2025 Rp	Jumlah Bantuan Tahun Anggaran 2026 Rp
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	480.213.000	423.114.000	423.114.000
2	Partau Golongan Karya (Golkar)	149.486.500	194.388.000	194.388.000
3	Partai Demokrat	137.425.000	193.302.000	193.302.000
4	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	120.691.500	137.250.000	137.250.000
5	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	62.464.000	58.068.000	58.068.000
6	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	40.126.000	49.632.000	49.632.000
Jumlah Total		990.406.000	1.055.754.000	1.055.754.000

Sumber Data : Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, berdasarkan Keputusan Bupati Jemberana Nomor 238/Kesbangpol/2026



Tabel Data C.7
Pelaksanaan Pendidikan Politik
Di Kabupaten Jembrana Tahun 2025

No	Waktu	Tempat	Sasaran	Jumlah Peserta
1	5 Jam	Sekretariat Partai Golkar	Masyarakat Umum	200 Orang
2	4,5 Jam	Sekretariat Partai Demokrat	Masyarakat Umum	150 Orang

Sumber Data : Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Tabel Data C.8
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Partai Politik

No	Nama Partai Politik	Jumlah Monev	Dokumen Hasil Monev	
			Ada	Tidak
1	PDI. P	1	✓	
2	Partai Golkar	1	✓	
3	Partai Demokrat	1	✓	
4	Partai Gerindra	1	✓	
5	PKB	1	✓	
6	PPP	1	✓	

Sumber Data : Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Tabel Data C.9
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan
di Kabupaten Jembrana

No	Tahun	Jumlah		Jumlah
		Ormas Dalam Negeri	Ormas Asing	
1	2023	136	-	136
2	2024	145	-	145
3	2025	159	-	159

Sumber Data : Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Tabel Data C.10
Nama Organisasi Kemasyarakatan / Yayasan
yang mendapat Sertifikat Bukti Laporan Diri
pada Badan Kesbangpol Tahun 2025

No	Nama Ormas/Yayasan	Alamat	Nomor Sertifikat
1	LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA (LVRI)	Jl. Pahlawan Belakang Gedung Veteran RI, Graha Purna Yudha, Kel. Pendem. Kec. Jembrana	220/009/Kesbangpol/2025



2	DPC PELITA PRABU (PENULIS AKTIVIS DAN PEWARTA PRABOWO SUBIANTO-GIBRAN RAKABUMING RAKA)	Br. Bale Agung, Desa Yehembang, Kec. Mendoyo	220/018/Kesbangpol/2025
3	YAYASAN ADI ARTHA KARA KUMARA	Jl. Sedap Malam No. 5, Kaliakah- Negara	200/044/Kesbangpol/2025
4	DPC BARISAN RELAWAN NUSANTARA RAYA (BRNR)	Jln. Ciung Wanara No 18, Br. Ledok, Desa Pulukan, Kec. Mendoyo	220/068/Kesbangpol/2025
5	HIMPUNAN WANITA DISABILITAS INDONESIA (HWDI)	Br. Ngoneng, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kec. Mendoyo	220/129/Kesbangpol/2025
6	PERSATUAN KELUARGA BESAR PURNAWIRAWAN POLRI (PP POLRI)	Jln. Bonsai, Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara	220/128/Kesbangpol/2025
7	PATRIOT GARUDA NUSANTARA (PGN)	Perumahan Mulya Jaya G4 LC Lingk. Mertasari, Kel. Loloan Timur, Kec. Jembrana	220/117/Kesbangpol/2025
8	PIMPINAN DAERAH AISYIYAH	Jln. Danau Kalimutu No. 53 Lingk. Ketapang. Kel. Lelateng	220/305/Kesbangpol/2025
9	YAYASAN BINA MAHAVIDYA MELAYA	Br. Melaya Tengah Kelod, Desa Melaya, Kec. Melaya	220/306/Kesbangpol/2025
10	YAYASAN PUTRA GURU FONDATION	Br. Pangkung Jajang, Desa Tukadaya, Kec. Melaya	220/307/Kesbangpol/2025
11	YAYASAN BALI DRESTA DWIPA JAYA	Br. Berangbang, Desa Berangbang Kec. Negara	220/308/Kesbangpol/2025

Sumber Data : Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Dalam proses penerbitan Sertifikat Bukti Laporan Diri bagi Organisasi Kemasyarakatan dan Yayasan (berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana melibatkan instansi dan lembaga sebagai Tim Verifikasi Pendaftaran Ormas / Yayasan.

Instansi dan Lembaga yang tergabung dalam Tim Verifikasi adalah :



1. Polres Jembrana
2. Kodim 1617 Jembrana
3. Kejaksaan Negara

Tabel Data C.11
Pelaksanaan Verifikasi Pendaftaran Ormas / Yayasan
di Kabupaten Jembrana Tahun 2025

No	Tahun	Jumlah Pelaksanaan Verifikasi Ormas
1	2023	22
2	2024	19
3	2025	9

Sumber Data : Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Tabel Data C.12
Pelatihan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan

No	Tahun	Jenis>Nama Pelatihan	Jumlah (orang)	Durasi (hari)	Tempat	Penyelenggara
1	2023	Pelatihan Pendidikan Politik bagi Pengurus Partai Politik	45 orang	1 hari	Ruang Rapat Badan Kesbangpol	Bidang Poldagri dan Ormas
2	2024	Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	50 orang	1 hari	Ruang Rapat Badan Kesbangpol	Bidang Poldagri dan Ormas
3	2025	Pelatihan Pendidikan Politik bagi Pengurus Partai Politik	50 orang	1 hari	Kantor Sekretariat Partai Politik	Bidang Poldagri dan Ormas
Jumlah Total			145 orang			

Sumber Data : Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan



Tabel Data C.13
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah
Partai Politik

No	Tahun	Partai Politik	Durasi (jam/hari)	Dokumen Hasil Monev	
				Ada	Tidak
1	2023	7 Partai Politik	1 jam/hari	✓	
2	2024	6 Partai Politik	1 jam/hari	✓	
3	2025	6 Partai Politik	1 jam/hari	✓	

Sumber Data : Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Tabel Data C.14
Monitoring dan Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan

No	Tahun	Ormas	Durasi (jam/hari)	Dokumen Hasil Monev	
				Ada	Tidak
1	2023	22 Ormas	2 jam/hari	✓	
2	2024	19 Ormas	2 jam/hari	✓	
3	2025	9 Ormas	2 jam/hari	✓	

Sumber Data : Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Tabel Data C.15
Program Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi
Tahun 2025

No	Program Kebijakan	Periode Pelaksanaan	Sasaran	Dampak Program
-	-	-	-	-

Sumber Data : Bidang Bina Ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa

Tabel Data D.1
Program Kebijakan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
Tahun 2025

No	Program Kebijakan	Periode Pelaksanaan	Sasaran	Dampak Program
1	Penyusunan rencana kerja di Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	1 Tahun	Terlaksananya penanganan konflik sosial	konflik social meningkatnya stabilitas keamanan dan harmoni sosial di masyarakat, serta menurunnya eskalasi konflik yang dapat mengganggu ketertiban umum



				di wilayah Jembrana.
			Terlaksananya kewaspadaan dini di daerah	Terwujudnya deteksi dini dan cegah dini yang efektif terhadap potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG), sehingga situasi wilayah tetap kondusif.
2	Penyusunan rencana kerja fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	1 Tahun	Terfasilitasinya kegiatan Forkopimda di daerah	Terwujudnya sinergitas dan harmonisasi kebijakan antar pimpinan daerah dalam pengambilan keputusan strategis, guna menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Jembrana.

Sumber Data : Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Tabel Data D.2
Program Kegiatan Bidang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Tahun 2025

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Sasaran	Dampak Yang Dihasilkan
1	Pembentukan SK Bupati tentang Forkopimda Kab. Jembrana Tahun 2025	1 Tahun	Membangun sinergitas hubungan antar unsur pimpinan di daerah guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan di daerah	Terwujudnya landasan operasional yang kuat dan legal bagi Forkopimda dalam pengambilan keputusan kolektif-kolegial yang cepat, tepat, dan terpadu guna menjaga stabilitas daerah.
2	Fasilitasi Kegiatan Forkopimda	1 Tahun	Terlaksananya kegiatan Forkopimda	Meningkatnya efektivitas komunikasi dan koordinasi intensif antar pimpinan daerah dalam mendeteksi serta mengatasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban secara cepat dan terpadu.

Sumber Data : Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional



Tabel Data D.3
 Program Kegiatan Bidang Penanganan Konflik Sosial
 Tahun 2025

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Sasaran	Dampak Yang Dihasilkan
1	Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan SK Bupati	1 Tahun	Menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum dan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang kondusif di daerah	Meningkatnya efektivitas pencegahan, penghentian, dan pemulihan pascakonflik melalui sinergi lintas instansi yang memiliki legitimasi hukum kuat untuk merespon dinamika sosial secara cepat.
2	Membuat Rencana Aksi Daerah Tahun 2025	1 Tahun	Tersusunnya data pemetaan potensi konflik di daerah	Meningkatnya akurasi deteksi dini dalam mengidentifikasi kerawanan sosial sehingga langkah pencegahan dan mitigasi dapat dilakukan secara tepat sasaran sebelum potensi konflik berkembang menjadi konflik faktual.
			Penanganan konflik faktual di daerah.	Terwujudnya resolusi konflik yang cepat dan tuntas, sehingga mencegah terjadinya eskalasi kekerasan, kerusakan aset, maupun trauma sosial di tengah masyarakat Jemberana.
			Terlaksananya rakor tim terpadu penanganan konflik sosial	Terbangunnya keselarasan langkah dan pertukaran informasi strategis antar instansi, sehingga penanganan gangguan keamanan dilakukan secara kolektif, komprehensif, dan tidak tumpang tindih.

Sumber Data : Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional



Tabel Data D.4
Program Kegiatan Tim Kewaspadaan Dini
Tahun 2025

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Sasaran	Dampak Yang Dihasilkan
1	Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini di Daerah dengan SK Bupati	1 Tahun	Menciptakan kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini terhadap potensi ancaman, tantangan,	Tersedianya sistem informasi dan koordinasi deteksi dini yang cepat serta legal, guna mengantisipasi potensi ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan) secara preventif demi stabilitas wilayah Jemberana.
2	Rakor Tim Kewaspadaan Dini	1 Tahun	Penguatan sinergi antar tim dan dalam mendeteksi dan mencegah potensi ancaman di daerah	Meningkatnya kecepatan respon dan kualitas pertukaran informasi strategis, sehingga deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dapat dilakukan secara terpadu, kolektif, dan tepat sasaran di wilayah Jemberana.

Sumber Data : Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Tabel Data D.5
Keanggotaan Tim Pengawasan Orang Asing
Tahun 2025

No	Nama Instansi/Lembaga	Jumlah Orang	Landasan Hukum
1	Badan Kesbangpol Kab. Jemberana	2	1. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 2. Peraturan Pemerinah No. 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 3. Permenkumham No. 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing
2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Jemberana	1	
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jemberana	1	
4	Dinas Tenaga Kerja Kab. Jemberana	1	
5	Camat se-Jemberana	1	

Sumber Data : Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional



Tabel Data D.6
Data Potensi Konflik di Kabupaten Jembrana
Tahun 2025

No	Jenis Konflik	Uraian Permasalahan	Analisa	Prediksi	Langkah yg telah diambil	Langkah yg akan diambil	Ket
1	IDEOLOGI	-	-	-	-	-	-
2	POLITIK	-	-	-	-	-	-
3	EKONOMI	Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)	Antisipasi kualitas gizi makanan untuk menghindari kontaminasi bakteri yang dapat memicu keracunan	Kualitas dan variasi menu yang tidak sesuai standar dan kurang variatif memicu ketidak.. menerima manfaat	Mendorong Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan BPOM agar melaksanakan pengawasan untuk memastikan kualitas dan kesehatan makanan		
4	SOSIAL	Belum adanya kesepakatan masalah tapal batas antara Desa Mendoyo Dauh Tukad dengan Desa Pohsanten			Mediasi	Perlu dibuatkan SK Bupati tentang Penetapan Tapal Batas Desa tersebut	

Sumber Data : Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Tabel Data D.7
Data Jumlah dan Jenis Konflik
Yang Sudah dan Belum Tuntas Ditangani Tahun 2025

No	Jenis Konflik	Uraian Permasalahan	Langkah Penanganan	Status		Ket
				Tuntas	Belum Tuntas	
1	Sosial	Kegiatan Asram Hare Krisna di Desa Delodberawah dan Iskon di Kaliakah Kauh, mendapat penolakan masyarakat setempat	Melakukan koordinasi, pertemuan dan peninjauan lokasi	√		

Sumber Data : Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Tabel Data D.8
Data Orang Asing di Kabupaten Jembrana



Tahun 2025

No	Asal Negara	Jenis Kelamin		Status Sosial	Ket
		L	P		
1	Jerman	164			
2	Australia	187			
3	Rusia	114			
4	Britania Raya	78			
5	Jepang	295			
6	Perancis	77			
7	Swiss	61			
8	Amerika Serikat	72			
9	Belanda	50			
10	Austria	30			
11	China	35			
12	Arab Saudi	19			
13	Sweden	24			
14	Spanyol	21			
15	Selandia Baru	26			
16	Denmark	18			
17	Polandia	24			
18	Italia	27			
19	Latvia	14			
20	Republik Ceko	16			
21	Kanada	25			
22	Singapura	14			
23	Ukraina	14			
24	Korea Selatan	14			
25	Hungaria	11			
26	Irlandia	12			
27	Rumania	9			
28	Norwegia	10			
29	Belgia	12			
30	Slovenia	10			
31	Brasil	14			
32	Turki	10			
33	Meksiko	6			
34	Unknown	6			
35	Lithuania	6			
36	Mesir	4			
37	India	7			
38	Malaysia	6			
49	Taiwan	3			
50	Azerbaijan	1			
51	Botswana	1			
52	Estonia	1			
53	Finlandia	3			
54	Iran	1			
55	Kolombia	1			
56	Kosta Rika	1			
57	Kroasia	2			
58	Lebanon	1			
59	Maldives	1			
60	Peru	3			
52	Saint Vincent the Grenadines	1			



53	Serbia	1			
54	Suriah	1			
55	Uni Emirat Arab	1			
56	Vietnam	1			
57	Afrika Selatan	3			
58	Nepal	1			
59	Rumania	2			
60	Fiji	1			
61	Saint Vincent the Grenadines	1			
62	Serbia	1			
63	Suriah	1			
64	Uni Emirat Arab	1			
65	Vietnam	1			
66	Afrika Selatan	3			
67	Nepal	1			
68	Rumania	2			
69	Fiji	1			
70	Bangladesh	1			
71	Kanada	1			
72	Virgin Islands, British	3			
73	Chile	1			
74	Mongolia	8			
75	Bulgaria	1			
JUMLAH		1.617			

Sumber Data : Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Tabel Data D.9
Data Monitoring dan Evaluasi di Bidang
Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Tahun 2025

No	Tahun	Sasaran Monev	Durasi (jam/hari)	Dokumen Hasil Monev	
				Ada	Tidak
1	2023	-	-	-	-
2	2024	-	-	-	-
3	2025	-	-	-	-

Sumber Data : Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional



Mitra Kerja

Mitra Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Jembrana meliputi berbagai elemen straregis seperti :



Galeri Kegiatan



Penutup

Profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Jemberana disusun sebagai upaya memberikan gambaran atau informasi mengenai identitas organisasi, gambaran tugas dan fungsi dari masing-masing bidang dalam menjalankan roda pemerintahan daerah, sejumlah data, serta beberapa kegiatan dan juga mitra yang terlibat dan bersinergi.

Tugas dan fungsi dilaksanakan melalui program dan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi. Dengan terdiskripsinya Profil Organisasi ini diharapkan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Badan Kesbangpol lebih tepat sasaran dan dapat mengikuti perkembangan zaman serta menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya.

Profil Organisasi ini juga merupakan salah satu bentuk keterbukaan informasi dan pemenuhan bagi kebutuhan antar perangkat daerah, stakeholders, kalangan pelajar, mahasiswa, komunitas masyarakat dan masyarakat umum.

Semoga Profil Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jemberana ini dapat memberikan kontribusi kelancaran pembangunan daerah khususnya pembangunan bidang sosial dan politik, serta dapat memberikan kontribusi terhadap kebutuhan informasi yang berkesinambungan, sehingga pada tahun berikutnya dapat dilakukan pengembangan yang lebih baik. Terimakasih.

Negara, 11 Maret 2026

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Jemberana,

I Made Leo Agus Jaya, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 196708041989021004



Tim Penyusun

Pengarah

I Made Leo Agus Jaya, S.Sos., M.Si.
Kepala Badan

Redaksi

I Wayan Andy Suka Anjasmara, S.STP., M.M.
Sekretaris Badan

Penyusun

Ida Bagus Ketut Surya Putra, SE., M.Si.
Analisis Kebijakan Ahli Muda

I Made Hendra Artawan, SE., M.Si
Kasubag Umum dan Keuangan

Ni Kadek Dea Anggareni, S.Ak.
PPPK

Layout Desain

Ida Bagus Ketut Surya Putra, S.E., M.Si.
Analisis Kebijakan Ahli Muda

Sumber Data dan Dokumen

Sekretariat Badan

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Website Pemkab Jembrana: www.jembranakab.go.id

Kecamatan Dalam Angka

